

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kriminalitas, merupakan perwujudan ketimpangan sosial, telah menjadi perhatian utama dalam studi pembangunan di berbagai belahan dunia. Tindakan kriminal, dalam beragam bentuk dan tingkatannya, tidak hanya mengganggu ketertiban dan keamanan, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktur sosial dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi individu (Januati & Miharja, 2019). Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, kriminalitas merupakan gejala kompleks yang berakar dari interaksi berbagai faktor, baik individual maupun struktural (Fachrurrozi et al., 2021).

Fenomena ini hadir di berbagai lapisan masyarakat, dengan pola dan karakteristik yang beragam berdasarkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Telah terjadi berbagai perubahan pada nilai-nilai yang dianut, seperti meningkatnya kecenderungan terhadap materialisme, hedonisme, dan nilai-nilai sejenis lainnya. Perubahan tersebut turut berdampak pada pergeseran sistem nilai yang berlaku di masyarakat (Dwi Oktalena et al., n.d.). Perubahan yang terjadi dalam perekonomian turut memengaruhi perilaku manusia. Perubahan yang bersifat positif cenderung memberikan dampak yang menguntungkan bagi masyarakat, sedangkan perubahan yang bersifat negatif dapat menimbulkan keresahan sosial akibat munculnya perilaku menyimpang, seperti tindak kejahatan atau kriminalitas (Putra et al., 2020).

Tingginya angka kriminalitas diduga berkaitan dengan sejumlah variabel ekonomi, antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, serta densitas penduduk di suatu wilayah (silvia & Ikhsan, 2021). (Handayani, 2017) Menyatakan bahwa kemiskinan, pengangguran, dan tekanan hidup memiliki kontribusi terhadap munculnya konflik sosial serta tindakan kriminal, baik secara nyata maupun melalui mekanisme pengaruh tidak nyata

Kriminalitas merupakan istilah yang memiliki konotasi negatif di tengah masyarakat. Jumlah kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia hingga saat ini sulit untuk dipastikan secara akurat karena jumlahnya yang terus meningkat. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, tekanan untuk mengikuti pola hidup modern mendorong sebagian individu untuk menempuh berbagai cara demi mencapai keinginan mereka, termasuk dengan melakukan tindakan yang menyimpang dari norma hukum dan moral. Fenomena ini pada umumnya dipengaruhi oleh beragam faktor, berasal dari diri sendiri seperti motivasi pribadi, ataupun luar diri seperti kondisi sosial dan ekonomi di sekitarnya.

Berbagai prasangka negatif dari masyarakat umumnya muncul ketika mendengar istilah tersebut, yang biasanya diarahkan kepada individu dewasa. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pelaku tindak kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, pembegal, hingga tindakan asusila umumnya merupakan orang-orang yang telah memahami risiko serta konsekuensi dari perbuatan mereka. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan norma sosial maupun norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi beberapa kasus kriminalitas yang Kasus ini merepresentasikan tantangan serius dalam aspek penegakan hukum dan stabilitas keamanan nasional. Salah satu peristiwa yang paling menyita perhatian publik adalah kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang menggiring nama mantan Kepala Divisi Profesi juga Pengamanan (Propam) Polri, Ferdy Sambo. Kasus ini mengungkap pelanggaran serius dalam institusi kepolisian, di mana Sambo memerintahkan penembakan terhadap ajudannya sendiri, yang kemudian berusaha ditutup-tutupi melalui manipulasi bukti dan informasi. Setelah proses peradilan yang panjang, pada 13 Februari 2023, Ferdy Sambo awalnya dijatuhi hukuman mati, namun putusan tersebut kemudian direvisi menjadi hukuman penjara akhir hayat oleh Mahkamah Agung pada 8 Agustus 2023. Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam lembaga penegak hukum.

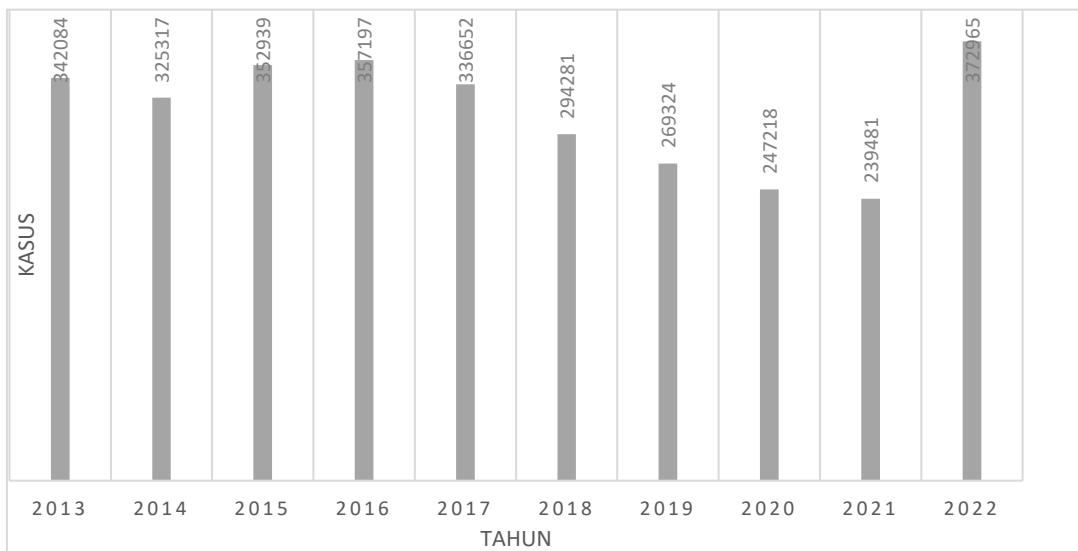
Selain itu, Indonesia juga menjadi lokasi penangkapan buronan internasional terkait kejahatan finansial. Pada November 2023, otoritas Indonesia menangkap Hector Aldwin Pantollana, seorang warga Filipina yang diduga menjalankan skema investasi palsu senilai lebih dari \$67 juta. Pantollana ditangkap di Bandara Internasional Bali setelah data biometriknya terdeteksi oleh sistem imigrasi otomatis. Penangkapan ini menyoroti kerjasama regional dalam memerangi kejahatan transnasional dan komitmen Indonesia dalam menindak pelaku kriminal yang mencoba bersembunyi di wilayahnya.

Sejumlah studi sebelumnya turut mengungkapkan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Selain variabel

ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, jumlah penduduk, dan kemiskinan, terdapat faktor-faktor lain yang juga berperan signifikan. Misalnya, penelitian oleh Syam dan Alam (2024) temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan berdampak pada penurunan tingkat kriminalitas properti, sementara kemiskinan memiliki pengaruh positif signifikan. Menariknya, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan justru menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kriminalitas properti. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairani dan Ariesa (2019) mengungkapkan bahwa variabel seperti pendidikan, tingkat pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pendapatan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan kepada tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatra Utara.

Penelitian lain menyoroti peran faktor sosial dan demografis. Misalnya, studi oleh Ramadhani et al (2024) menemukan bahwa kepadatan penduduk berhubungan positif dengan kriminalitas, sementara kemiskinan, rata-rata pendapatan, dan pengangguran tidak berhubungan signifikan. Selain itu, penelitian oleh Pasiza et al (2018) Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia memiliki keterkaitan langsung dengan variabel kepadatan penduduk serta tingkat pengangguran terbuka. Penelitian lain oleh N. F. Ramadhani dan Irfan (2024) mengungkap bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencurian tanpa kekerasan, pada saat yang sama, variabel pengangguran menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap tindak pencurian tanpa kekerasan serta

kejahatan penipuan. Temuan-temuan ini menekankan bahwa selain faktor ekonomi, variabel sosial dan demografis dan mengoperasikan bagian penting untuk mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia.



Sumber: BPS 2025

Gambar 1. 1 Jumlah Kriminalitas di Indonesia tahun 2013-2022 (Jiwa)

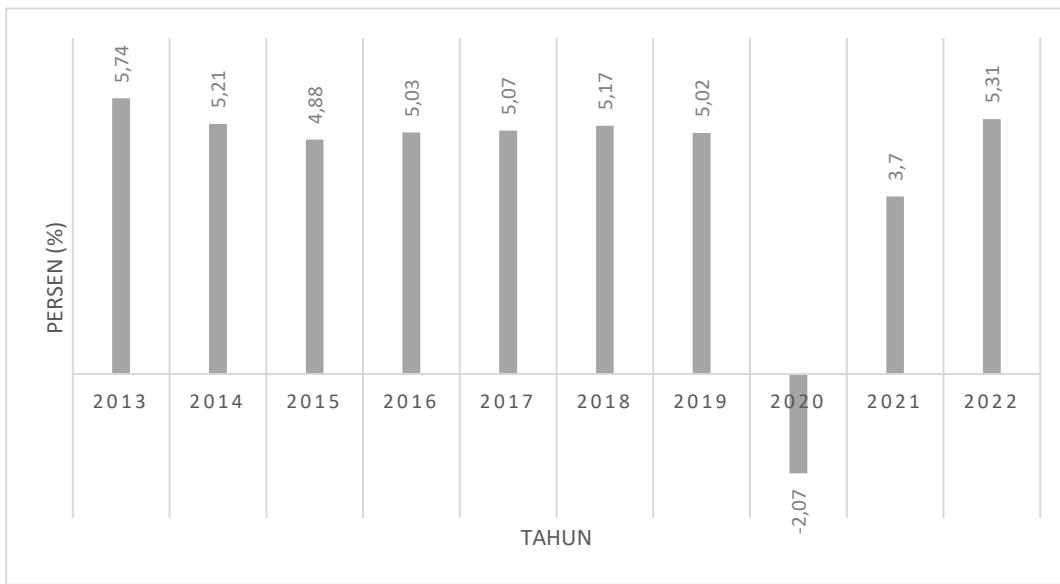
Data kriminalitas di atas menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2013 hingga 2022. Secara keseluruhan, angka kriminalitas tertinggi tercatat pada tahun 2022, dengan 372.965 kasus, sementara angka terendah tercatat pada tahun 2021 dengan 239.481 kasus. Pada awal periode, yaitu tahun 2013, jumlah kriminalitas berada di angka 342.084 kasus.

Angka ini kemudian mengalami penurunan ditahun 2014 menjadi 325.317 kasus, tetapi kembali naik pada tahun 2015 dan 2016, masing-masing dengan angka 352.939 dan 357.197 kasus. Pada tahun 2017, angka kriminalitas kembali turun menjadi 336.652, dan penurunan terus berlanjut hingga 2021, mencapai titik terendah dalam data ini. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2022 dengan peningkatan angka kriminalitas menjadi 372.965 kasus, yang merupakan

jumlah tertinggi dalam periode sepuluh tahun tersebut. Fenomena ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mungkin memengaruhi lonjakan kriminalitas pada tahun 2022 setelah tren penurunan selama beberapa tahun sebelumnya.

Fenomena yang terlihat dari data ini menunjukkan bahwa permasalahan kriminalitas di Indonesia masih membutuhkan perhatian serius serta penanganan yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan. Variabel-variabel yang memengaruhi, antara lain laju tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, besarnya meningkatnya penduduk, serta tingkat kemiskinan dapat menjadi determinan penting yang mempengaruhi dinamika tingkat kriminalitas di berbagai daerah. Dengan demikian, upaya penanganan berbagai permasalahan tersebut menuntut penerapan strategi yang menyeluruh serta keterlibatan sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat guna menciptakan kondisi yang lebih aman dan tertib di seluruh penjuru Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor dalam setiap terciptanya kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang merupakan faktor kunci yang mendukung upaya pengurangan tingkat kemiskinan, karena pertumbuhan tersebut membuka lebih banyak kesempatan kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan pada gilirannya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan kontribusi terhadap penerimaan negara. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menjadi landasan utama bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara luas di era modern (Adiyanta, 2018).



Sumber: BPS, 2025

Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2013-2022 (Persen)

Data perkembangan ekonomi Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi domestik maupun global. Pada awal periode tahun 2013, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,74%, kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga tahun 2015, dengan angka terendah dalam tiga tahun tersebut sebesar 4,88%. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi mulai sedikit membaik pada tahun 2016 dan bertahan pada kisaran sekitar 5% hingga 2019, meskipun tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi drastis hingga -2,07%, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Bencana tersebut menimbulkan perlambatan perekonomian secara internasional, termasuk pada Indonesia, sehingga angka pertumbuhan terkontraksi untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir. Pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,7%, meskipun belum mencapai tingkat sebelum pandemi.

Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia kembali menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 5,31%, mendekati tingkat pertumbuhan sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang cukup kuat setelah terdampak krisis akibat pandemi. Tingkat kriminalitas pada tahun 2022 tercatat sebagai yang tertinggi selama periode observasi. Temuan ini tidak selaras dengan teori yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kriminalitas. Artinya, peningkatan PDRB perkapita diempat kota Provinsi Aceh seharusnya diikuti oleh penurunan tingkat kriminalitas (Fajri & Rizki, 2019).

Semua faktor berpotensi mempengaruhi kondisi sosial dan berhubungan erat dengan tingkat kriminalitas. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dampak pandemi yang cukup mendalam, dan ketimpangan dalam distribusi hasil ekonomi menciptakan kondisi sosial yang rentan dan dapat mendorong tindakan kriminal, terutama ketika kesenjangan ekonomi di masyarakat semakin nyata.

Pertumbuhan ekonomi sering dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Menurut teori determinasi ekonomi dalam kriminologi yang dikemukakan oleh Karl Marx, tekanan ekonomi dapat mendorong individu melakukan tindak kekerasan sebagai upaya mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik Syam dan Alam (2024). Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat menurunkan insentif untuk melakukan kejahatan. Penelitian oleh Kasma dan Permata (2022) Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan bukan memberikan pengaruh yang signifikan kepada tingkat kriminalitas.

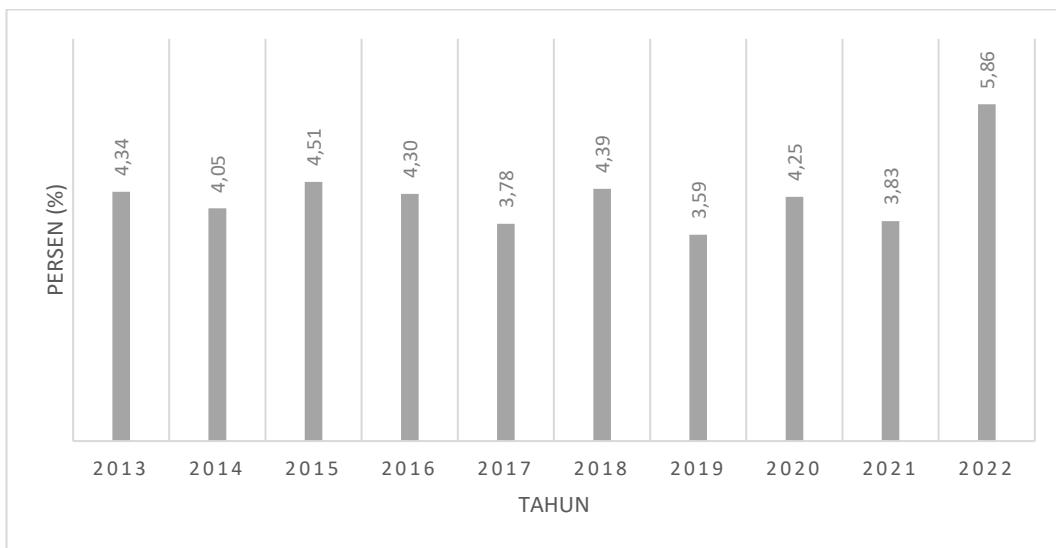
Sebaliknya, tingkat kemiskinan terbukti memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap angka kriminalitas di Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mampu menekan angka kemiskinan dapat berkontribusi dalam upaya penurunan kriminalitas. Namun, kenaikan pertumbuhan ekonomi bukan selalu sejalan dengan penurunan tingkat kejahatan.

Penelitian oleh Mubarok dan Saepudin (2024) menemukan bahwa kepadatan penduduk berhubungan positif dengan kriminalitas, sementara kemiskinan, rata-rata pendapatan, dan pengangguran tidak berhubungan signifikan. Di samping itu, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak secara otomatis berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, terutama jika pertumbuhan tersebut lebih berorientasi pada sektor bersifat padat modal dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif rendah (Nurhasta, 2024). Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan pengangguran tetap tinggi, yang pada gilirannya dapat memicu peningkatan kriminalitas. Oleh karena itu, kualitas pertumbuhan ekonomi dan distribusinya menjadi faktor kunci dalam menentukan dampaknya terhadap tingkat kriminalitas.

Menurut pandangan ekonomi klasik telah dinyatakan oleh Adam Smith, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran. Artinya, terdapat hubungan positif antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan penurunan jumlah pengangguran. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan aktivitas produksi, yang secara langsung meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga kerja. Karena itu, semakin tinggi tenaga kerja terserap, maka angka pengangguran pun

menurun. Secara umum, tingkat pengangguran adalah sebagian dari indikator penting pada menilai kesuksesan pembangunan ekonomi suatu negara (Anggoro & Soesatyo, 2015).

Secara teoritis menurut (Ridho, 2010) Permintaan tenaga kerja yang rendah bisa terjadi akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketersediaan tenaga kerja. Kondisi ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Seseorang yang menganggur dan tidak memiliki penghasilan akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak.



Sumber: BPS,2025

Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2013-2022 (Persen)

Tingkat pengangguran di Indonesia pada 2013–2022 menunjukkan pola fluktuatif. Angka pengangguran tercatat 4,34% pada 2013, turun menjadi 4,05% pada 2014, lalu naik kembali menjadi 4,51% pada 2015. Setelah itu, terjadi penurunan bertahap hingga mencapai 3,78% pada 2017, yang merupakan titik terendah selama periode tersebut.

Pada tahun 2018, tingkat pengangguran mengalami sedikit kenaikan menjadi 4,39% dan kembali menurun di tahun 2019 ke angka 3,59%, yang menjadi angka terendah kedua dalam sepuluh tahun terakhir. Di waktu bencana COVID-19 melanda pada tahun 2020, angka pengangguran meningkat menjadi 4,25% sebagai dampak dari penurunan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2021, terjadi penurunan tingkat pengangguran ke 3,83%, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, tahun 2022 mencatat kenaikan tajam pada tingkat pengangguran hingga mencapai 5,86%, angka tertinggi dalam satu dekade terakhir. Kenaikan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penciptaan lapangan kerja yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau kebijakan tertentu, meskipun ekonomi sudah mulai pulih dari dampak pandemi.

Data tersebut mengindikasikan bahwa pengangguran merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh beragam faktor. Tingginya tingkat pengangguran berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah meningkatnya angka kriminalitas, khususnya di wilayah-wilayah yang mengalami tekanan ekonomi yang signifikan. Hal ini relevan dalam konteks penelitian yang menelaah pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia, data ini memberikan bukti bahwa pengangguran adalah hal-hal krusial yang harus diperhatikan dalam proses analisis. Stabilitas ekonomi juga kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja di seluruh provinsi menjadi kunci dalam

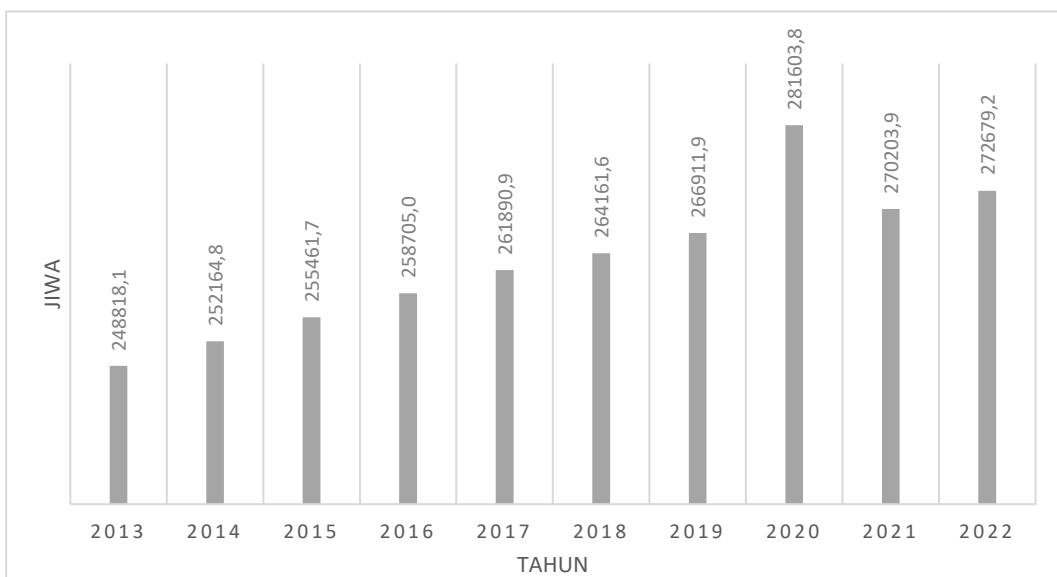
upaya mengurangi tingkat pengangguran dan dampak negatif yang ditimbulkannya, termasuk kriminalitas.

Pengangguran sering dianggap sebagai faktor signifikan yang mempengaruhi tingkat kriminalitas. Ketiadaan pekerjaan dapat menyebabkan tekanan ekonomi dan psikologis, mendorong individu untuk mencari alternatif pemenuhan kebutuhan, termasuk melalui tindakan kriminal. Penelitian di Kabupaten Solok menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengangguran berdampak pada peningkatan tindak kriminal (Ismah, 2015). Selain itu, bahwa kondisi pengangguran tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berpotensi mendorong individu melakukan tindakan kriminal sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Sabiq dan Apsari (2021).

Namun, pengangguran tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kriminalitas. Beberapa Hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat variabel lain yang turut berkontribusi, contohnya kemiskinan juga ketimpangan pendapatan, mempunyai peran lebih dominan dalam mempengaruhi tingkat kriminalitas. Misalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa pengangguran tanpa dampak signifikan terhadap kriminalitas, sedangkan kemiskinan mempunyai dampak positif yang signifikan Kasma dan Permata (2022). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa pengangguran tidak signifikan terhadap tindakan kriminal, adapun variabel kemiskinan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan Mervita et al (2022). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pengangguran berpotensi memengaruhi tingkat kriminalitas, terdapat faktor lain seperti kemiskinan dan

ketimpangan pendapatan yang kemungkinan memberikan dampak yang lebih signifikan.

Peningkatan angka pengangguran di daerah berpenduduk padat kerap kali berkorelasi erat dengan meningkatnya angka kriminalitas (Fajri & Rizki, 2019). Pertumbuhan penduduk yang berlangsung dengan laju menyebabkan keterbatasan dalam penyerapan tenaga kerja. Rendahnya permintaan terhadap tenaga kerja ini berimplikasi pada meningkatnya jumlah pengangguran, yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya tindakan kriminal.



Sumber: BPS,2025

Gambar 1. 4 Jumlah Penduduk di Indonesia tahun 2013-2022 (Jiwa)

Data jumlah penduduk mulai tahun 2013 hingga 2022 menunjukkan beberapa pola menarik. Dari tahun 2013 hingga 2019, jumlah penduduk mengalami peningkatan yang konsisten, dengan rata-rata kenaikan sekitar 2-3 juta jiwa per tahun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk berada di angka 248.8 juta, dan terus meningkat hingga mencapai 266.9 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini

menunjukkan adanya tren pertumbuhan populasi yang stabil selama tujuh tahun pertama dalam data tersebut.

Namun, pada tahun 2020 terjadi lonjakan yang signifikan dalam jumlah penduduk, mencapai 281.6 juta jiwa. Peningkatan ini tidak lazim dibandingkan dengan pola sebelumnya dan tampak sebagai anomali dalam tren data. Tahun 2021 menunjukkan penurunan cukup drastis ke angka 270.2 juta jiwa, kembali ke pola peningkatan stabil di tahun-tahun sebelumnya, dan pada tahun 2022 penduduk bertambah sedikit menjadi 272.7 juta jiwa. Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai kemungkinan dampak dari berbagai faktor, termasuk perubahan metode pengumpulan data atau faktor-faktor eksternal lain yang mempengaruhi populasi secara keseluruhan.

Data ini memberikan gambaran bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia bukan bergantung pada satu faktor, akan tetapi merupakan hasil dari interaksi antara berbagai faktor seperti migrasi, angka kelahiran, mortalitas, beserta berbagai aspek ekonomi dan sosial yang saling berkaitan secara dinamis. Perubahan jumlah penduduk pada setiap provinsi ini dapat memberikan implikasi terhadap berbagai aspek pembangunan, baik dalam hal kebutuhan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, hingga ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jumlah penduduk.

Pemahaman terhadap pola ini sangat penting dalam konteks perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk mendukung perkembangan populasi yang seimbang dan Mewujudkan situasi yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi

dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, analisis terhadap pertumbuhan penduduk di berbagai provinsi di Indonesia dapat memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat sasaran dan dapat mengantisipasi berbagai rintangan yang kemungkinan muncul di masa mendatang, terutama terkaitan dengan masalah kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas yang sering kali berkaitan erat dengan dinamika demografis.

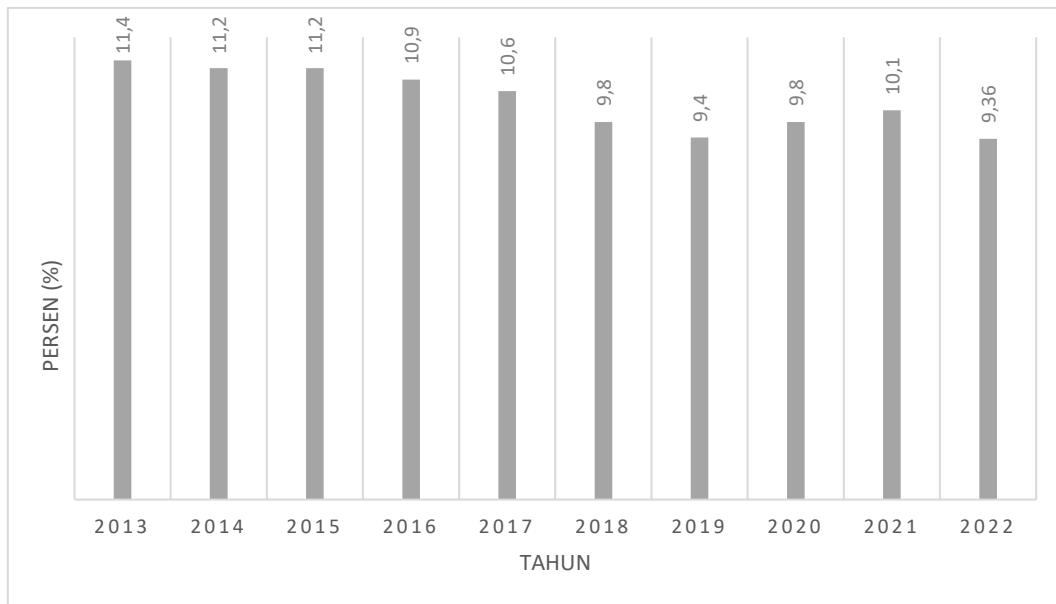
Jumlah penduduk yang tinggi sering dikaitkan dengan peningkatan tingkat kriminalitas. Beberapa alasan menjadi penyebab utama dari hal ini, termasuk keterbatasan sumber daya, lapangan pekerjaan, juga layanan publik. Penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan keterbatasan sumber-sumber pokok dan lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tindakan kriminal Sabiq dan Nurwati (2021). Selain itu, penelitian diKota Langsa menemukan tingginya penduduk terbukti berkontribusi secara nyata dan signifikan kepada kriminalitas, menandakan bahwa daerah berpopulasi padat cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih ekstrim. Berpotensi memperlihatkan angka kriminalitas yang lebih besar Dari dan Asnidar (2022).

Jumlah penduduk yang tinggi juga tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kriminalitas. Faktor-faktor lain, seperti tingkat pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan Efektivitas dalam penegakan hukum turut berkontribusi secara signifikan dalam memengaruhi tingkat kriminalitas di suatu wilayah. Misalnya, pada penelitian Edwart dan Azhar (2019) menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, variabel kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap tingkat kriminalitas, yang berarti bahwa peningkatan kepadatan penduduk justru dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Selain itu, penelitian lain menemukan bahwa variabel kepadatan penduduk tidak berpengaruh signifikan kepada tingkat kriminalitas, menunjukkan bahwa faktor-faktor lain mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi tingkat kejahatan Jayanti dan Yudha (2023). Dengan demikian, meskipun jumlah penduduk dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas, dampaknya sangat bergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berlaku di suatu wilayah.

Menurut (Christiani et al., 2014) Tingginya kepadatan penduduk dapat memicu berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, serta naiknya angka kriminalitas. Kondisi ini terjadi karena tingginya tekanan terhadap sumber daya, infrastruktur, dan ketersediaan pekerjaan. Kemiskinan sendiri menggambarkan situasi di mana individu tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar hidupnya secara layak seperti ekonomi, sosial, serta mengalami ketergantungan terhadap pihak lain akibat rendahnya tingkat pendapatan dan kepemilikan aset (Dulkiah et al., n.d.).

Salah satu faktor yang mendorong seseorang hidup dalam kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumbangan daya manusia, yang tercermin dari tingkat pendidikan yang masih rendah. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya peluang untuk memperoleh pendapatan yang layak. Ketika pendapatan tidak mencukupi untuk mencukupi kebutuhan dasar, sebagian individu terdorong untuk melakukan tindak kriminal, seperti pencurian, sebagai bentuk respons terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 1. 5 Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2013-2022 (Persen)

Data tingkat kemiskinan dari tahun 2013 hingga 2022 menunjukkan adanya tren penurunan secara bertahap dari 11.4% pada 2013 hingga mencapai 9.4% pada 2019. Penurunan ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut, ada kemajuan dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Namun, pada tahun 2020, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9.8%, yang berpotensi disebabkan pada dampak pandemi COVID-19. Kondisi ini berlanjut di 2021 dengan peningkatan lebih lanjut menjadi 10.1%, mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat dalam masa pemulihan.

Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan kembali turun ke 9.36%, yang menunjukkan adanya perbaikan dan pemulihan ekonomi setelah periode krisis. Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan kemiskinan pada 2020-2021, tren jangka panjang menunjukkan penurunan yang positif, yang mengindikasikan

adanya upaya yang efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia sepanjang dekade tersebut.

Data kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun beberapa provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan, permasalahan kemiskinan yang masih ada dapat berdampak pada peningkatan angka kriminalitas. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, tingginya angka pengangguran, dan tingginya jumlah penduduk menjadi pemicu utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan dan secara tidak langsung memicu tindak kriminal.

Ketika individu atau kelompok merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup karena keterbatasan ekonomi, tindakan kriminal sering kali muncul sebagai alternatif terakhir dalam menghadapi tekanan tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi tingkat kriminalitas di Indonesia, sangat penting untuk fokus pada pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, serta pengendalian pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan komprehensif yang memperhatikan semua faktor ini, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan aman dari tindak kriminal.

Kemiskinan sering dianggap memiliki hubungan erat dengan tingkat kriminalitas. Keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, dan peluang kerja dapat mendorong individu untuk mencari alternatif pemenuhan kebutuhan melalui tindakan kriminal. Penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan angka kriminalitas cenderung terjadi secara signifikan apabila tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi mengalami eskalasi Nisa et al., (2024). Selain itu,

masyarakat miskin cenderung tinggal di lingkungan dengan keteraturan sosial yang rendah, yang dapat meningkatkan risiko kriminalitas Putri dan Azansyah (2016). Namun, kemiskinan tidak selalu berkorelasi positif dengan peningkatan kriminalitas.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan, Selain itu, efektivitas dalam penegakan hukum turut berperan signifikan dalam memengaruhi tingkat kriminalitas yang terjadi. Misalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa kemiskinan ariabel tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan kepada tingkat kriminalitas, sementara ketimpangan penhasilan justru memberikan dampak nyata yang signifikan pada peningkatan angka kejahatan Soraya et al., (2024). Selain itu, hasil penelitian lain mengindikasikan bahwa Kemiskinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, yang memperlihatkan bahwa kenaikan angka kemiskinan cenderung disertai dengan peningkatan tingkat kriminalitas Agustina (2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan dapat berkontribusi terhadap kriminalitas, dampaknya sangat bergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berlaku di suatu wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kriminalitas di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kriminalitas di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, jumlah penduduk dan kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kriminalitas di Indonesia
2. Mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia
3. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap kriminalitas di Indonesia
4. Mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia
5. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, jumlah penduduk dan kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Setelah mengetahui Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Jumlah Penduduk dan Kemiskinan terhadap Kriminalitas secara akademis

diharapkan mampu meningkatkan wawasan pengetahuan penulis Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Jumlah Penduduk, Kemiskinan, dan Kriminalitas.

2. Bagi pihak-pihak lain atau peneliti selanjutnya dapat menjadi acuan atau referensi dalam menentukan atau melaksanakan penelitian yang sama di masa mendatang dengan ruang pendekatann dan ruang lingkup yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Pemahaman mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Jumlah Penduduk, dan Kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi kebijakan serta merumuskan strategi pembangunan nasional.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk memperluas wawasan dan menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak, termasuk kalangan industri dan masyarakat umum.